

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 5 Bulan Juni 2021 (tanggal 28 Juni s.d 2 Juli)



DESAKAN REVISI UU ASN BAGI TENAGA HONORER

**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri
anin.amrynudin@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Berbagai pihak mendesak segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya terkait nasib tenaga honorer seperti Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) yang mendesak DPR dan pemerintah segera menyelesaikan revisi UU ASN agar tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak di bidang pelayanan public dapat diangkat menjadi ASN. FPPPI mengklaim bahwa sudah memperjuangkan nasib para pekerja honorer melalui revisi UU ASN sejak 2016, namun sampai saat ini revisi tidak kunjung selesai.

Permasalahan dalam revisi UU ASN lainnya adalah terkait manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar Nonkategori 35+ (GTKHMK35+) mengatakan bahwa program PPPK merupakan program gagal karena tidak memberikan keadilan terhadap para guru honorer yang sudah diatas 35 tahun. Sementara itu, Ombusman Republik Indonesia juga memberi masukan untuk pasal 105 RUU ASN terkait pemutusan hubungan kerja serta pasal 131a RUU ASN yang mengatur pengalihan status tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi ASN.

Saat ini DPR RI telah mengadakan rapat dan memasuki pembicaraan tingkat I membahas isu dan klaster dalam UU ASN. Menurut Komisi II persoalan kebijakan mengangkat PPPK untuk daerah sangat krusial dan dilematik, karena ada tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Permasalahan yang terjadi terkait program PPPK yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah, karena kebijakan pengangkatan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun gaji dibebankan kepada pemerintah daerah.

SUMBER

Media Indonesia, 29 Juni 2021; dpr.go.id, 28 Juni 2021; Republika, 29 Juni 2021.